



SKRIPSI

**PENERAPAN PENARIKAN PAJAK OLEH PEMERINTAH PUSAT,
PROVINSI, DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN
UMUM PERPAJAKAN**

***TAXATION BY CENTRAL GOVERNMENT, PROVINCE, AND REGENCY
GOVERNMENT BASED ON LAW ACT NUMBER 16 YEARS 2009 ABOUT
GENERAL CERTAINTY OF TAX***

Oleh :

RADIT YUNIARDITA JAYA SUBANGKIT

NIM : 080710101217

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**PENERAPAN PENARIKAN PAJAK OLEH PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI,
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM
PERPAJAKAN**

***TAXATION BY CENTRAL GOVERNMENT, PROVINCE, AND REGENCY
GOVERNMENT BASED ON LAW ACT NUMBER 16 YEARS 2009 ABOUT
GENERAL CERTAINTY OF TAX***

Oleh :

RADIT YUNIARDITA JAYA SUBANGKIT

NIM : 080710101217

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

“Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in
harmony”

(Mahatma Gandhi)¹

¹ <file:///I:/All%20Published.htm> diakses pada 22 September 2013 pkl. 14.00

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tersayang dan tercinta almarhum Ayah Joyo Santoso dan Ibunda Sri Marhaeni yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku, dan telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun selama ini. Doa, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran dari ayah dan ibu tercinta tidak akan tergantikan dengan apapun;
2. Alma Mater Universitas Jember dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah.

PRASYARAT GELAR

**PENERAPAN PENARIKAN PAJAK OLEH PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI,
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM
PERPAJAKAN**

***TAXATION BY CENTRAL GOVERNMENT, PROVINCE, AND REGENCY
GOVERNMENT BASED ON LAW ACT NUMBER 16 YEARS 2009 ABOUT
GENERAL CERTAINTY OF TAX***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RADIT YUNIARDITA JAYA SUBANGKIT

NIM : 080710101217

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JEMBER,

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 17 FEBRUARI 2014

Oleh :
Pembimbing,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H
NIP.195911151985122001

Pembantu Pembimbing,

IDA BAGUS OKA ANA, S.H, M.M.
NIP.196011221989021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENERAPAN PENARIKAN PAJAK OLEH PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI,
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM
PERPAJAKAN**

***TAXATION BY CENTRAL GOVERNMENT, PROVINCE, AND REGENCY
GOVERNMENT BASED ON LAW ACT NUMBER 16 YEARS 2009 ABOUT
GENERAL CERTAINTY OF TAX***

Oleh :

RADIT YUNIARDITA JAYA SUBANGKIT

NIM : 080710101217

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 11

Bulan : Februari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

ANTIKOWATI S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji :

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

.....

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Radit Yuniardita Jaya Subangkit

NIM : 080710101217

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, **”PENERAPAN PENARIKAN PAJAK OLEH PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI, DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN”**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Februari 2014

Yang menyatakan,

RADIT YUNIARDITA JAYA SUBANGKIT
NIM : 080710101217

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **”PENERAPAN PENARIKAN PAJAK OLEH PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI, DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, saran, pengarahan dan semangat yang tidak ternilai harganya dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Antikowati S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
4. Rosita Indrayati S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang

telah membantu dan memberikan saran serta semangat hingga terselesaikannya skripsi ini;

8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hukum terimakasih telah banyak memberikan bekal ilmu, pengetahuan dan bantuan selama perkuliahan;
10. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2008 yang tidak bisa saya sebutkan semua, semoga sukses dan selalu menjunjung tinggi kejujuran;
11. Kakak saya tercinta Desyilia Jayantri Manika terimakasih atas doa dan dukungannya;
12. Teman-teman kost S39 semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan serta kebersamaan dan telah menjadi saudara terbaik selama saya berada di Jember, susah senang kita lalui bersama semoga sukses selalu menyertai kita;
13. Teman-teman terbaikku Novita Nadhirotul, Muhammad Yudha Hawaril, Anugerah Juta Marsingga, Adriyana Tiara Putri B., Muhammad Sulthon S., Galih Pamungkas, Muhammad Sandy, Isma Husnu Nida, Rinta Ami S., Putri Ayu Trisnawati, Eko Prastyanto, Dyah Ayu Putri Windy N., terima kasih atas segalanya, doa, dukungan serta kebersamaan bersama kalian tidak akan bisa tergantikan;
14. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT selalu tercurahkan kepada kita semua. Diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, 14 Februari 2014

Penulis

RINGKASAN

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur wewenang-wewenang pemerintah pusat dalam hal penarikan pajak. Pajak-pajak yang dianggap sebagai pajak yang berskala besar dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikelola oleh pemerintah pusat, yang kemudian pajak ini disebut dengan pajak pusat. Ada beberapa pajak yang menjadi wewenang pemerintah pusat antara lain: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Barang Mewah (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Meterai.

Penarikan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kemudian disebut dengan Pajak Daerah. Wewenangnya dibedakan antara pajak yang ditarik oleh pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Namun prinsipnya sama, kedua wewenang tersebut ada yang kemudian diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing daerah tersebut. Agar terjadi penarikan pajak yang efektif dan sistematis, dan kemudian tidak juga terjadi penarikan pajak berganda maka penarikan pajak pajak daerah ini diatur dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Penulisan skripsi ini berjudul, “Penerapan Penarikan Pajak Oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, bertujuan khusus untuk : 1) Untuk memahami apa saja kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal penarikan pajak berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2007; 2) Untuk memahami tentang penarikan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 agar tidak terjadi pamarikan pajak berganda.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara mengkaji aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan

permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dengan demikian, penelitian skripsi ini bersifat yuridis normatif. Bahan yang dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum bersifat deduktif.

Hasilnya dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, penarikan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Ketentuan dalam perundang-undangan tersebut diharapkan memberikan instruksi yang jelas tentang apa yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penarikan pajak.

Saran yang dapat disampaikan dalam skripsi ini adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan peraturan perundangan bersifat mengatur dan harus dilaksanakan. Indikator kesiapan yang baik diantaranya dapat ditunjukkan dari seberapa cepat Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian kebijakan perpajakan dengan kondisi daerah. Penyesuaian yang tepat juga akan mendorong daya saing daerah, karena iklim investasi menjadi lebih kondusif. Selain itu, kemitraan dalam memikul tanggung jawab terhadap pembangunan semakin merata dan nyata di kalangan masyarakat, karena regulasi pajak daerah dan retribusi daerah menjadi lebih jelas, pasti, dan sederhana. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi daerah dapat didorong sebagai buah dari sumber pendanaan yang tersedia secara lebih memadai.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
a. Bahan Hukum Primer.....	6
b Bahan Hukum Sekunder.....	7
c Bahan Non Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
1.4.5 Proses Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pajak.....	10
2.1.1 Pengertian Pajak dan Hukum Pajak.....	10

2.1.2	Dasar hukum Pajak.....	12
2.1.3	Jenis-jenis Pajak.....	13
2.1.4	Fungsi Pajak.....	15
2.2	Wajib Pajak.....	16
2.2.1	Pengertian Wajib Pajak.....	16
2.2.2	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	16
2.3	Asas-asas Pemungutan Pajak.....	19
2.4	Sistem Pemungutan Pajak.....	21
BAB III	PEMBAHASAN.....	22
3.1	Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Penarikan Pajak.....	22
3.1.1	Pajak Penghasilan.....	22
3.1.2	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.....	24
3.1.3	Pajak Bumi dan Bangunan.....	25
3.1.4	Pajak/Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan.....	27
3.1.5	Bea Meterai.....	29
3.2	Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Penarikan Pajak Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	31
3.2.1	Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penarikan Pajak Kendaraan Bermotor.....	36
3.2.2	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penarikan Pajak Parkir.....	40
BAB IV	PENUTUP.....	48
4.1	Kesimpulan.....	48
4.2	Saran.....	49

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN